

manajemen humas dalam mengantisipasi dan memanfaatkan berbagai kesempatan, serta tantangan atau perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Sesungguhnya peran manajemen humas itu dapat bertindak sebagai tanda bahaya yang berperan untuk mendukung atau membantu pihak manajemen pendidikan berjaga-jaga menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi terhadap lembaga pendidikan. Mulai dari timbulnya isu, berita negatif, meluasnya isu negatif yang kurang menguntungkan terhadap lembaga pendidikan atau nama lembaga yang sedang bermasalah hingga penurunan citra, bahkan kehilangan citra yang dapat menimbulkan berbagai resiko yang menyangkut krisis kepercayaan maupun krisis manajemen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas manajemen humas pendidikan akan menjalankan perannya yaitu kepentingan menjaga nama baik dan citra lembaga pendidikan agar selalu dalam posisi yang menguntungkan. Salah satu metode yang dipergunakan adalah melalui cara, ajakan atau imbauan, bukan merupakan paksaan. Biasanya manajemen humas akan melaksanakan strategi komunikasi yang lebih jelas.

Dengan demikian, maka pendukung program kerja dan peran pokok humas adalah bekerja demi kepentingan umum, dapat memelihara komunikasi yang baik antara organisasi dan masyarakat dengan moral yang baik. Jadi peran ideal yang harus dimiliki oleh manajemen humas dalam suatu lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut:

Lembaga pendidikan sesungguhnya melaksanakan fungsi rangkap terhadap masyarakat yaitu memberi layanan dan sebagai agen pembaharu atau penerang. Dikatakan sebagai fungsi layanan karena ia melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Fungsi layanan itu tidak hanya terbatas kepada pemberian pendidikan dan pengajaran kepada para putra warga masyarakat, tetapi juga melayani aspirasi daerah-daerah setempat.

Seperti diketahui bahwa keadaan satu daerah dengan daerah yang lain tidak sama yang membuat masing-masing daerah memiliki kebutuhan sendiri-sendiri.

Itulah yang bisa diberikan oleh lembaga pendidikan kepada masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga memberikan sesuatu yang tidak kalah pentingnya dari pada pemberian lembaga pendidikan kepadanya. Pemberian itu ialah berupa tanggung jawab bersama. Masyarakat yang terbina dengan baik akan merasa bahwa lembaga pendidikan itu juga miliknya yaitu milik bersama. Yang mereka rasa perlu dipelihara dipertahankan dan dimajukan.

Selanjutnya dengan mengadakan kontak hubungan dengan masyarakat memudahkan organisasi pendidikan itu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya di masyarakat dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik warga masyarakat. Lembaga pendidikan dapat mengikuti arus dinamika masyarakat lingkungannya.

1. Untuk menetapkan target–target operasi humas yang nantinya akan menjadi tolak ukur atau segenap hasil yang diperoleh.
2. Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang dibutuhkan.
3. Untuk memilih prioritas-prioritas yang paling penting guna menentukan:
 - a) Jumlah program
 - b) Waktu yang diperlukan guna melaksanakan segenap program humas yang telah diprioritaskan tersebut.
4. Untuk menentukan kesiapan atau kelayakan pelaksanaan berbagai upaya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan jumlah dan kualitas.
 - a) Personal yang ada
 - b) Daya dukung dari berbagai peralatan fisik seperti: alat-alat kantor, dsb
 - c) Serta anggaran dana yang tersedia

Kata-kata yang paling penting diingat disini antara lain adalah jam kerja, prioritas, penentuan waktu, sumber daya, peralatan, dan anggaran. Dalam mengejar suatu tujuan kita selalu saja menghadapi hambatan abadi yang berupa keterbatasan sumber daya. Tanpa adanya suatu program yang terencana, kegiatan humas terpaksa beroperasi secara instingtif sehingga mudah kehilangan arah akan selalu tergod

Tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelolah berbagai aktivitas manajemen humas tersebut dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen humas yang dikelola secara profesional dan dapat di pertanggungjawabkan hasil atau sasarannya. Hal tersebut dapat terwujud jika keduanya mendapatkan informasi yang jelas, serta mudah dimengerti oleh keduanya.

Secara umum pengertian dari perencanaan humas yaitu terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan, wujud rencana kerja dan alasan dilakukannya perencanaan kerja humas.

Manfaat perencanaan manajemen humas antara lain yaitu :

- a) Mengefektifkan dan mengefesienkan koordinasi atau kerja sama antara pihak yang terkait.
- b) Mengefesienkan waktu, tenaga, upaya, dan biaya.
- c) Menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas atau kongkret .
- d) Mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi, pelaksanaan, komunikasi, target, dan sasaran yang hendak dicapai dimasa mendatang.
- e) Menetapkan klasifikasi rencarana strategis sesuai dengan kebijakan jangka panjang, rencana tetap yang dapat dilakukan berulang-ulang dan rencana tertentu.

Dengan demikian perencanaan humas hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan datang, dimana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Itulah sebabnya berdasarkan kurun waktu dikenal perencanaan tahunan atau perencanaan jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.²⁵

Apapun jenis perencanaan itu ia selalu mengikuti langkah-langkah tertentu, langkah itu tidak persis sama antara yang dilakukan seorang ahli dengan ahli-ahli lainnya. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Menentukan kebutuhan, kemudian memprioritaskan satu atau beberapa daripadanya menjadi tujuan perencanaan.
- b. Melakukan ramalan dan menentukan program serta alternatif-alternatif pemecahannya.
- c. Menspesifikasi program.
- d. Memilih alternatif pemecahan.²⁶

²⁵ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 49-50

²⁶ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hal. 226

b. Pengoorganisasian

Untuk mencapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, diperlukan kerjasama antara semua anggota organisasi, proses ini disebut pengoorganisasian.

Pengoorganisasian adalah proses pembagi kerja dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikannya sumber daya, mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.²⁷

Secara singkat kupasan Ernest Dale dapat diartikan bahwa pentingnya pengoorganisasian adalah :

- 1) Tugas-tugas yang terinci harus dibuat dalam mencapai tujuan organisasi.
- 2) Seluruh tugas-tugas harus dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dan sesuai bagi individu maupun kelompok.
- 3) Pekerjaan-pekerjaan anggota organisasi harus dikombinasikan secara logis dan efisien.
- 4) Perlunya pengendalian dan pengawasan untuk meningkatkan efektifitas.

Pengoorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi; sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang

²⁷ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, 71

melingkupinya. Pembagian kerja adalah pemerincian tugas agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengoorganisasian suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Tehnik pengoorganisasian adalah usaha sadar yang dilakukan oleh suatu organisasi, dengan menggunakan daya analisis untuk menelaah kelemahan-kelemahan dalam keefektifan dan koordinasi organisasi.²⁸

Organisasi dalam arti statis adalah suatu bagan atau suatu bentuk yang berwujud dan bergerak demi tercapainya tujuan bersama, dalam istilah lain disebut sebagai struktur atau tata raga organisasi. Jadi struktur organisasi adalah suatu manifestasi organisasi yang menunjukkan hubungan antara fungsi otoritas dan tanggung jawab yang saling berinteraksi dari orang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas semua aktivitas.

Pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara pekerja. Dan pengorganisasian juga dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan pembagi tugas, mendelegasikan otoritas, dan

²⁸ Dydiet Hardjito, *Teori Organisasi Dan Teknik Pengoorganisasian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 74-79.

menetapkan aktifitas yang hendak dilakukan oleh manajemen humas. Oleh karena itu, dalam pengorganisasian diperlukan tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai
- 2) Deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktifitas tertentu
- 3) Klasifikasi aktifitas dalam kesatuan yang praktis.²⁹

c. Pengaktifan

Setelah setiap personalia mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab, tibalah saatnya pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini disebut pengaktifan. Pengaktifan adalah kegiatan menggerakkan semua personalia agar melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengaktifan bisa juga disebut penggerakan (*actuating*), pemimpinan (*leading*), atau pengarahan (*directing*). Penggerakan dimaksudkan sebagai upaya untuk membuat semua anggota kelompok mau bekerja dan bersedia mengembangkan segenap pikiran dan tenaganya untuk membuat semua anggota kelompok mau bekerja dan bersedia mengembangkan segenap pikiran dan tenaganya untuk melakukan tugas pekerjaannya dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Penggerak atau pemotivasian (pengaktifan) yaitu dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental yang memberikan energi mendorong kegiatan, atau menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi keseimbangan secara singkat, pengaktifan

²⁹ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) hal. 73-75

dirasakan masyarakat. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat berhak melaksanakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaanya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dan pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lainnya. Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsure masyarakat yang peduli terhadap pendidikan sedangkan komite sekolah adalah lembaga yang terdiri dari unsure orang tua, komunitas, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan pendidika berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dalam tingkat nasional, profinsi, dan

kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Sedangkan peningkatan mutu pelayanan ditingkat satuan pendidikan dan peran tersebut menjadi tanggung jawab komite sekolah³³

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik ke sekolah. Dalam hal ini sekolah sebagai system social merupakan bagian integral dari system social yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberikan penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain: (1). Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak, (2). Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan (3). Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang dapat

³³ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multi Kultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hlm 61-62

dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, hubungan kerjasama ini tidak perlu dibina. Pada masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan, sekolah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan hubungan kerjasama yang lebih harmonis.

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar terjadi hubungan dan kerjasama yang baik antar sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid,

diprediksi oleh pihak lain, kedua belah pihak harus bersikap terbuka dan jujur. Sikap terbuka dan jujur inilah yang kemudian melahirkan sikap saling percaya.

Sikap saling percaya akan membuat hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi harmonis. Keharmonisan ini, jika bisa dipertahankan dalam waktu lama akan membuahkan rasa saling memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap sekolah. Jika masyarakat sudah merasa memiliki sekolah, maka masyarakatpun akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap sekolah. Dengan demikian, maka dukungan masyarakat baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk yang lain akan lebih mudah diperoleh sekolah.

Untuk bisa menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, sekolah mesti sebanyak mungkin menjalin komunikasi dengan masyarakat. Untuk bisa menghasilkan komunikasi yang efektif, yang berupa saling pengertian dan hubungan yang semakin baik, maka sekolah perlu:

1. Bersikap terbuka dan jujur terhadap masyarakat melalui jalinan komunikasi timbal balik yang saling menghargai.
2. Mampu menyerap aspirasi masyarakat tentang pendidikan yang diharapkan masyarakat
3. Berusaha untuk memahami keadaan masyarakat, baik dari segi sosial budaya maupun ekonomi masyarakat
4. Menterjemahkan kondisi masyarakat tersebut melalui program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat

Dengan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, komunikasi sekolah dalam rangka kerja sama sekolah dengan masyarakat akan menjadi lebih lancar. Kerja sama antara sekolah dengan masyarakat memang terlihat belum maksimal. Bentuk kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan bisa bermacam-macam, baik berbentuk materi maupun dalam bentuk nonmaterial. Bentuk nonmateri misalnya aktifnya anggota masyarakat dalam kelembagaan komite sekolah melalui pemberian saran dan ide-ide tentang pengembangan sekolah. Sedangkan dalam bentuk materi bisa berupa sumbangan masyarakat kepada sekolah.

Kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan memerlukan kesadaran masyarakat akan arti penting peran mereka dalam peningkatan kualitas pendidikan. Untuk menghasilkan kerja sama dan tingkat partisipasi yang tinggi, pertama kali sekolah harus menyadarkan masyarakat akan peran mereka dalam pembangunan pendidikan. Setelah kesadaran itu tercapai, sekolah mesti melakukan komunikasi secara lebih intensif dengan masyarakat agar kesadaran masyarakat berbuah dukungan. Untuk itu manajemen hubungan sekolah masyarakat perlu dikelola dengan lebih baik.

Elemen masyarakat yang perlu “didekati” untuk melakukan kerja sama dan berpartisipasi dalam pengembangan sekolah adalah komite sekolah. Komite sekolah adalah representasi dari warga sekolah yang terdiri dari perwakilan guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan warga masyarakat. Sebagai representasi dari warga sekolah, komite sekolah mempunyai kepentingan terhadap pengembangan

